

Transformasi Nelayan di Pesisir Kepulauan Bengkalis (Studi Tentang Pergeseran Pola Interaksi Sosial, Agama, Alat Penangkapan, dan Perubahan Ekosistem)

Oleh: Hurmain¹ dan Puriana²

Abstract

Fisherman Transformation in Coastal of Bengkalis Islands (Study About Shifting Patterns of Social Interaction, Religion, Tool Arrest, and Ecosystem Change)

Development paradigm shift toward people-centered development (people centered development) who appreciate and consider initiatives and local differences. Therefore, local communities should be able to explore and develop the potential socio-economic as well as manage the diverse socio-economic potential in order to develop independently and sustainable community development through community based. The results of field studies show that global flows and empowerment programs that have been implemented are not able to assist fishing communities to increase their incomes so that the empowerment program that existed for only a program that spends money without a clear purpose. Fishing effort in Bengkalis has huge potential if it is able to manage the opportunities and strengths and to minimize weaknesses and threats coming from inside and outside the business. During this time, due to lack of knowledge about good management, the management of fishing activities of daily routine that must be converted into how to develop it into a bigger business because its potential is still quite large and underutilized.

Keywords: Transformation, Fishermen, and Coastal

Pendahuluan

Penelitian ini berupaya memahami tentang fenomena sosial komunitas nelayan Melayu Bengkalis³ hingga terjadinya perubahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁴. Melalui studi ini akan terlihat kecenderungan, pola, arah, dan interaksi, serta banyak fakta yang memacu terjadinya perubahan. Selanjutnya akan teruji secara mendalam dan rinci dari satu konteks, serta akan terjaring beberapa subjek atau dari satu kejadian khusus. Alur pemikiran penelitian ini terstruktur secara skematis dalam gambar berikut ini:



Skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut: komunitas Nelayan Melayu di Bengkalis adalah

masyarakat lokal yang memiliki ciri tersendiri menganut Islam taat dan memiliki adat melayu yang kuat. Dengan ciri tersebut, pengaruh perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen dalam menggerakkan industrial akan mengalami artikulasi. Artikulasi dimaksud adalah munculnya ciri perkembangan industri yang berbeda dari ciri perkembangan industri pada masyarakat barat. Perbedaan demikian terjadi karena adanya keeksistensi antara ciri tata produksi kapitalisme atau industrial yang dimunculkan oleh perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen dengan ciri produksi feodalisme atau non-industrial yang merupakan unsur asli dalam masyarakat.

Konsep transformasi dalam telaah ini akan dikaitkan dengan transformasi industri. Transformasi industrial adalah proses yang melibatkan pengembangan teknologi dan metode kerja (Ponsioen, 1969: 158), perkembangan, organisasi kerja dan manajemen produksi (Schneider, 1986: 108) dan perkembangan investasi masyarakat (Rostow, 1964: 291). Dalam transformasi industri, industri perdesaan merupakan bentuk transisi yang perkembangannya dapat berfungsi mengakumulasi dan mentransfer modal dari tata produksi berciri feodal atau non

industrial ke tata produksi berciri kapitalistik atau industrial (Saith, 1986: 170).

Transformasi industrial di Indonesia dicirikan oleh dualisme antara industri prakapitalis dengan industri kapitalis tinggi (Boeke, 1962: 26-27). Dalam kaitan ini, industri yang dominan berkembang di perdesaan lebih mencirikan bentuk transisi menuju industri kapitalis tinggi. Menurut Saleh (1936: 11), industri kerajinan dan rumah tangga di Indonesia terutama alat penangkapan ikan merupakan keterampilan lokal bermodal kecil yang kebanyakan menggunakan bahan baku dari lingkungan terdekat dengan harga jual relatif murah dan diproduksi secara massal.

Nelayan merupakan Industri perdesaan berskala kerajinan dan rumah tangga yang bersifat spesifik. Perkembangannya melibatkan keterampilan lokal, pemodal, dan organisasi produksi yang, berbasis pada masyarakat komunitasnya sendiri, sebagian juga karena peranan pemerintah melalui bantuan modal dan teknologi. Sebagai Industri perdesaan, nelayan Melayu yang berkembang di Riau dapat digambarkan sebagai bentuk transformasi dari industri prakapitalis ke industri kapitalis tinggi. Tahap transformasi tersebut telah berlangsung lama dan dalam perkembangannya kemiskinan, kesenjangan dan ketergantungan masih ditemukan. Ini berbeda dengan sistem industri masyarakat Barat yang perkembangannya dari ciri prakapitalis ke ciri kapitalis tinggi tidak memerlukan transisi yang lama. Untuk memahami fenomena ini, pemikiran Tiryakian (1992) tentang dialektika modernitas dalam perubahan sosial dijadikan acuan teori.

Kerangka Teoretis

Istilah transformasi memiliki pengertian perubahan menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya. Dalam hubungan timbal balik sebagai individu-individu maupun kelompok-kelompok (lihat: Ensiklopedia Nasional Indonesia).

Timbulnya transformasi sosial bukanlah tanpa sebab, tetapi dipengaruhi oleh ragam faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah timbunan kebudayaan, kontak dengan kebudayaan lain, penduduk yang heterogen, kekacauan sosial dan perubahan sosial itu sendiri. Dalam transformasi sosial akan melibatkan penduduk, teknologi, nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial. Dalam ensiklopedi nasional Indonesia disebutkan pula, seringkali istilah

transformasi sosial diartikan sama dengan perubahan sosial.

Bagi Weber, bayangan transformasi itu tidaklah lewat suatu proses dialektika linear sebagaimana pikiran Marx, namun proses transformasi dan perubahan itu melalui proses evolusioner yang mana berbagai unsurnya saling berpengaruh atau saling mempengaruhi dalam sebuah tipe ideal masyarakat. Dari pemaparan tersebut, sebenarnya pengertian transformasi itu dikenakan pada sejumlah objek sehingga sebagai konsep, sering merupakan sebuah diskusi yang panjang. Dari rintisan para pemikir besar itulah, lahirlah berbagai pendukung dan pemrotes. Namun, transformasi itu mengabsahkan pendapat masing-masing pendukung atau pemrotes dalam konteks teori-teori besar yang memiliki ideologi.

Dalam perkembangan selanjutnya teori-teori sosial yang dibangun oleh dua tokoh tersebut semakin berkembang yang kemudian melahirkan pendukung seperti Talcot Parsons yang kemudian melahirkan teori kapitalisme di pihak Weber. Kemudian dari pihak Marx muncul para pemikir sosial berhaluan kritis yang menganjurkan model sosialis, seperti Antonio Gramsci, Habermas, dan Foucault yang senantiasa mempersoalkan relasi sosial sebagai biang keladi munculnya ketidakadilan.

Dari pemaparan tersebut, meskipun terdapat perbedaan, penulis simpulkan bahwa teori transformasi sosial disamakan dengan perubahan sosial, dan perubahan sosial adalah reproduksi dan transformasi.

Menurut Tiryakian (1992: 79), dalam perubahan sosial atau modernisasi, terdapat dua proses signifikan yang terjadi, yakni diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan. Dikatakan bahwa dua proses ini yang menentukan sejauhmana perubahan sosial atau modernisasi tetap diikuti oleh integrasi masyarakat dan terhindarkan dari patologi sosial. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan merupakan faktor yang harus dianalisis karakteristik dan keseimbangan perkembangannya.

Tiryakian (1992: 91) juga menyimpulkan bahwa dua proses tersebut tidak berlangsung linear, melainkan terjadi proses, baik dalam bentuk dediferensiasi untuk diferensiasi dan dalam bentuk derasionalisasi untuk rasionalisasi. Dianjurkan bahwa perubahan sosial atau modernisasi dilihat dengan pendekatan dialektik antara diferensiasi dan

rasionalisasi dan mempertimbangkan dediferensiasi dan derasionalisasi sebagai proses baliknya. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan tidak hanya dilihat dalam hal karakteristik dan keseimbangan perkembangan antara keduanya, tetapi juga pada proses batik terhadap keduanya dalam bentuk dediferensiasi dan derasionalisasi.

Dengan acuan teori yang demikian, perkembangan investasi, teknologi dan manajemen pada komunitas nelayan Melayu akan mendorong terjadinya diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan. Dugaan ini didasarkan pada argumen bahwa perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen adalah stimulan perubahan sosial dalam konteks transformasi industrial, dan karena diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan adalah proses yang signifikan dalam perubahan sosial, berarti perkembangan investasi, teknologi dan manajemen akan mendorong diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan tersebut.

Pada tahap transformasi pola interaksi, alat penangkapan nelayan Melayu menjadi komunitas maritim modern, ketidakseimbangan antara diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan akan merupakan fenomena yang signifikan. Dugaan ini didasarkan pada argumen bahwa suatu transformasi industrial sebagai pendorong perubahan sosial melibatkan dialektika antara diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan, sementara itu dialektika dimaksud akan berlangsung minus bila keduanya berlangsung seimbang. Tahap transformasi adalah tahap ketidakseimbangan menuju keseimbangan dalam suatu perubahan sosial, dengan demikian ketidakseimbangan antara diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan akan menjadi ciri dari tahap transformasi tersebut.

Salah satu indikator dari transformasi komunitas nelayan di Bengkulu adalah pergeseran bentuk hubungan industri di dalamnya. Hubungan industri tersebut bergeser dari ciri hubungan interaksi sosial patron-klien ke ciri hubungan kontraktual (Ponsioen, 1969), dari ciri hubungan yang multikompleks ke ciri hubungan yang simpel (Legg, 1983: 70), atau dari ciri hubungan yang berbasis moral ke ciri hubungan yang berbasis rasionalitas (Popkin, 1979: 12). Dalam penelitian ini, pergeseran hubungan pola interaksi patron-klien ke hubungan industrial (alat penangkapan) hingga pada perubahan ekosistem dijadikan indikator dari transformasi industrial yang berlangsung.

Orang Melayu Bengkulu di masa lalu seperti etnis lain, seperti etnis Bugis sangat dicirikan oleh hubungan patron-klien berhubung keadaan alam, kekacauan keamanan dan perilaku elit memang mengkondisikannya (Ahimsa Putra, 1998: 159). Hubungan patron-klien tersebut menjelma tidak hanya pada masyarakat maritim tetapi juga pada masyarakat pertanian dan kalangan pedagang (Felras, 1981: 1). Dengan demikian, pergeseran hubungan patron-klien ke hubungan industrial sangat relevan dijadikan indikator bagi transformasi industrial pada komunitas maritim di Bengkulu.

Hubungan patron-klien adalah hubungan antara dua orang yang berbeda kedudukan sosial-ekonominya, pihak yang berkedudukan tinggi memberi perlindungan dan keuntungan yang dibalas oleh pihak yang lebih rendah dalam bentuk dukungan atau jasa pribadi (Scoft, 1972b: 8). Hubungan tersebut dicirikan oleh ketimpangan pertukaran (*inequality of exchange*), sifat luwes dan meluas (*diffuse and flexibility*), dan ciri mempribadi (*face to face character*) dari hubungan (Scoft, 1972: 9). Untuk melihat sejauh mana hubungan patron-klien masih terwujud pada komunitas nelayan Patorani di Riau berarti tiga ciri tersebut bisa dijadikan indikator.

Dalam konteks budaya lokal Melayu Bengkulu dikenal berlakunya nilai agama dan adat sebagai acuan tindakan, termasuk tindakan yang berhubungan dengan pencapaian di bidang ekonomi (Bandingkan, Errington, 1977: 5; Andava, 1979: 367; Mattulada, 1982: 200). Menurut hasil wawancara dengan tokoh Melayu Bengkulu, pada aspek ekonomi kehidupan masyarakat Melayu Bengkulu tidak bekerja dan lemah usaha dianggap sesuatu yang menimbulkan 'asor' sesuatu yang merendahkan harga diri. Dengan demikian, di satu sisi nilai adat adalah sumber acuan tindakan, di sisi lain malas bekerja dan lemah usaha dianggap melanggar nilai adat berarti nilai agama dan adat dapat berfungsi mendorong orang untuk bekerja keras untuk pencapaian di bidang ekonomi, dalam hal ini termasuk perkembangan industri maritim. Dari uraian itu, dapat diduga bahwa pada tingkat aktor, nilai adat telah berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi berlangsungnya transformasi industrial, dari karena diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan adalah proses signifikan dalam transformasi industrial, berarti nilai adat juga berfungsi mendorong tercapainya keseimbangan diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan.

Menurut McDelland (1937: 43), suatu kebudayaan menghasilkan daya dorong bagi perkembangan ekonomi bila dalam kebudayaan itu tertanam kebutuhan berprestasi (*need for achievement*) yang tinggi. Dihubungkan dengan teori itu, pengaruh nilai adat dan agama dalam mendorong transformasi komunitas Nelayan Bengkalis terletak pada sejauhmana etos kerja yang bersumber dari nilai tersebut menempatkan prestasi kerja sebagai hal yang utama. Sebagaimana dikatakan Abdullah (1979: 3), etos kerja terkait dengan sumber motivasi seseorang dalam bekerja dan sejauhmana sumber motivasi tersebut cukup kuat untuk terciptanya prestasi kerja. Dalam hal ini, karena nilai adat merupakan motivasi tindakan yang utama, berarti etos kerja pada komunitas nelayan di Bengkalis adalah etos kerja yang menempatkan prestasi kerja sebagai bagian dari penegakan nilai adat dan agama. Selanjutnya juga dapat diduga bahwa karena agama dan adat adalah sesuatu yang sangat berharga, yang seseorang mau berkorban untuk menegakkannya, berarti masyarakat komunitas nelayan di berdaya lebih tinggi untuk suatu prestasi kerja. Artinya, terdapat etos kerja yang kuat dalam berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan Melayu dan karena diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan adalah proses signifikan dalam transformasi industrial tersebut, berarti etos kerja yang kuat itu juga berpengaruh dalam tercapainya keseimbangan diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan.

Geografis

Bengkalis seperti termuat dalam Buku 'Annual Social Economic Report of Bengkalis Regency 2012' merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Riau, dikenal dengan sebutan Negeri Junjungan. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Ibukota Kabupaten berada di Pulau Bengkalis terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak.

Pengembangan Kabupaten Bengkalis menjadi daerah dengan konsentrasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata hendaklah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan swasta. Dengan otonomi yang dimiliki Kabupaten Bengkalis maka setiap keputusan/kebijaksanaan dalam menangkap peluang pengembangan dapat segera dihasilkan tanpa melalui proses birokrasi yang

panjang. Kondisi inilah yang diharapkan menjadi keunggulan Bengkalis dalam menghadapi globalisasi dan persaingan bebas,

Kabupaten Bengkalis pada mulanya dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 dengan luas 30.646,83 km², kemudian dengan perkembangan ekonomi, politik, dan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai dan Nomor 53 tahun 1999 tentang pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Riau, dimekarkan menjadi empat kota/kabupaten termasuk Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten induk.

Kemudian Berdasarkan UU No. 12 tahun 2009 Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga luas Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 km². Berdasarkan Undang-undang tersebut, Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupa, Rupa Utara, Bengkalis dan Bantan.

Secara administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi delapan kecamatan, 20 kelurahan, 102 desa/kelurahan dengan luas wilayah 8.861,00 km². Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen, mayoritas penduduk beragama Islam. Di samping suku melayu yang merupakan suku mayoritas penduduk, juga terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, etnis Tionghoa dan sebagainya. Begitu juga suku asli/terasing yang masih terdapat di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kota Bengkalis sebagai ibukota kabupaten terkenal dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini merupakan penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat sekitarnya. Kota lainnya adalah Kota Duri yang merupakan daerah penghasil minyak, selain itu kota Duri ini juga merupakan kota industri. Kota Sungai Pakning yang merupakan ibukota Kecamatan Bukitbatu merupakan kota penghubung antara Pulau Bengkalis dengan Riau Daratan, sehingga ke depan kota Sungai Pakning ini akan dikembangkan menjadi kota transit antar daerah di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan

internasional menuju Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Adapun secara geografis, Kabupaten Bengkalis terletak di bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera, antara 2°08'00"-0°55'52" LU dan 100°05'36"-102°03'32" BT. Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan:

Utara: Selat Malaka

Timur: Meranti dan Karimun

Selatan: Siak

Barat: Dumai dan Rokan Hilir

Nelayan Melayu Bengkalis

Nelayan di Bengkalis punya cerita yang sama dengan kebanyakan nelayan di belahan daerah di Indonesia. Mereka masih sering mengenang masa lalu yang lebih baik, saat mereka tidak perlu harus melaut jauh ke tengah lautan ketika mereka ingin mendapatkan ikan. Mereka mengambil ikan cukup dengan sampan pancung dan ikan langsung dipungut dengan tangan di pinggir sungai (parit anak sungai) dengan serok yang terbuat dari bambu. Pada saat itu, hasil tangkapan selalu melimpah. Bengkalis dulu terkenal sebagai penghasil ikan terkemuka di dunia. Banyak pendatang dari luar sengaja mencari ikan di laut Bengkalis yang terkenal dengan ikan Terubuknya. Tidak sedikit pula di antara mereka yang menikah dengan perempuan Melayu Bengkalis dan menetap di sana. Potensi laut Bengkalis yang demikian besar, tetapi hasilnya akhir-akhir ini semakin berkurang (7-10 tahun terakhir). Lalu patut dipertanyakan melalui kajian ini: Bagaimana upaya komunitas nelayan Bengkalis dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidupnya di sekitar hutan *mangrove* untuk peningkatan hasil tangkapan ikan laut dan untuk berkelanjutan komunitasnya?

Dalam penyediaan alat produksi, nelayan seringkali harus membina hubungan dengan pihak penyandang dana. Nelayan pun membina hubungan dengan nelayan buruh yang akan membantunya dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam aktivitas distribusi pemasaran, para nelayan juga berhubungan dengan pihak lain, seperti para pedagang. Berbagai hubungan yang dibina oleh para nelayan menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat seimbang atau tidak seimbang. Hubungan tidak seimbang biasanya

menjadi hubungan patron-klien, di mana patron mempunyai dan memperoleh sumber daya yang berlebih dibanding kliennya.

Sedangkan hubungan yang seimbang memperlihatkan pola hubungan yang bersifat pertemanan, seperti hubungan antar nelayan. Kedua pola hubungan sosial tersebut terjadi pada kelompok nelayan kecil (tradisional) ataupun pada kelompok nelayan besar. Namun, pola hubungan dalam kelompok nelayan besar lebih kompleks daripada kelompok nelayan kecil, baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Komunitas nelayan merupakan komunitas pinggiran yang kesejahteraan berada di bawah garis ekonomi rata-rata.

Arif satria (2004) mengemukakan perikanan berkelanjutan. Menurutnya, ada tiga dimensi penting dalam konsep perikanan berkelanjutan, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Keberlanjutan ketiga dimensi tersebut merupakan tipe ideal. Artinya, suatu tipe yang hanya berfungsi sebagai acuan, yang sebenarnya secara empiris sulit ditemukan. Yang secara empiris ada adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut. Suatu saat dimensi ekologi yang menonjol, pada saat yang lain dimensi sosial dan ekonomi yang menonjol. Adalah fungsi kebijakan (*policy*) untuk mengatur proses tarik ulur tersebut sehingga ketiganya berada dalam kondisi yang seimbang. Bentuk kebijakan itu beragam tergantung pada hierarki perikananannya: *coastal fisheries*, *off shore fisheries*, atau *distant fisheries*.

Pada *coastal fisheries* atau perikanan pesisir yang umumnya digerakkan para nelayan tradisional, kebijakan umumnya dipegang oleh institusi lokal, baik kelompok nelayan, komunitas adat atau desa, atau populer dengan sebutan *Community Based Management* (CBM). Komunitas nelayan memiliki aturan sendiri dalam menyeimbangkan ketiga dimensi itu. Acuanya adalah nilai lokal yang memang penuh dengan kearifan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa tingkat resiliensi atau kekenyalan institusi lokal terhadap pengaruh eksternal semakin menurun. Modernisasi yang merupakan bagian dari kapitalisme global seolah merupakan keniscayaan. Pengaruh positifnya adalah nelayan menjadi melek teknologi. Nelayan juga menjadi bagian dari pasar (market). Namun, dampak negatifnya juga tidak kecil. Dimensi ekonomi menjadi makin dominan menggeser dimensi sosial dan ekologi. Kearifan lokal luntur. Wajar bila lalu muncul masalah kerusakan sumber daya pesisir.

Menurut Sulaiman Tripa (2001), pemerintah harus menempatkan *community paradigm* (paradigma komunitas) dan ekonomi kerakyatan pada posisi penting untuk membangun kesejahteraan dan mengatasi krisis ekonomi. *Community paradigm*-lah yang memikirkan tiga hal sekaligus: kesejahteraan nelayan, kelestarian dan keberlanjutan, dan kebangunan komunitas nelayan itu sendiri. Paradigma ini boleh dikatakan sebagai kemandirian lokal, yakni kemandirian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu tanpa memandang suku, agama, atau ras. Jadi melibatkan secara penuh masyarakat lokal dalam proses pembangunan daerah dan masyarakatnya. Pertimbangannya, selain karena pengetahuan turun-temurun, juga karena tanggung jawab yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjaga entitasnya sendiri. Intinya, merekalah yang beranggapan bahwa merusak lingkungan kelautan berarti merusak kelanjutan hidup mereka sendiri.

Kajian Sulaiman Trips menitikberatkan pada perlunya penguatan *community paradigm* dalam membangun perikanan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan, dalam paradigma ini adalah kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan, pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat persekutuan, dan kebangunan komunitas lokal dalam persekutuan itu. Itulah gambaran bagaimana kesadaran nelayan lokal bila dibandingkan dengan nelayan luar. Memberi perlindungan kepada nelayan lokal yang bisa mencapai keselamatan sektor perikanan maupun menutupi kebutuhan kesejahteraan, termasuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Menurut *community paradigm*, ketidakberdayaan yang terjadi di komunitas nelayan harus dimusnahkan oleh komunitas itu sendiri. Keberlanjutan mereka sebagai nelayan ditentukan oleh hasil tangkapan laut yang dieksplorasi dari dalam laut. Jika ikan-ikan itu tidak dilestarikan keberadaannya maka putuslah mata rantai kesejahteraan yang akan mereka peroleh.

Komunitas nelayan Bengkulu terdiri dari beberapa kelompok masyarakat:

1. Komunitas nelayan petambak. Ada dua tipe petambak, yaitu petambak dengan tanah sendiri dan petambak dengan tanah menyewa, baik menyewa tanah adat maupun perhutani. Petambak yang kedua mendapatkan hasil yang sangat kecil karena selain biaya operasionalnya besar juga harus membayar sewa tanah. Petambak ini kebanyakan memelihara udang galah dan selama lima sampai tujuh bulan baru bisa dipanen.

Bahkan ada yang sampai satu tahun, ketika imlek.

2. Komunitas nelayan tangkap, kelompok dengan mata pencaharian utama menangkap ikan di laut, sungai, dan muara.
3. Komunitas nelayan pengumpul/pedagang. Mereka mengumpulkan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun langsung dari nelayan.
4. Komunitas nelayan buruh, kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif.
5. Komunitas nelayan pengolah (misalnya ikan asin, terasi dan lain-lain). Kelompok ini biasanya memanfaatkan ikan-ikan tertentu untuk diasinkan atau diolah kembali menjadi terasi, yang kemudian dijual ke daerah lain sampai ke Jakarta. Kelompok ini masih sedikit.

Kegiatan melaut dilakukan pada waktu yang bermacam-macam. Secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga waktu, yaitu penangkapan ikan pada pagi hari, sore hari, dan malam hari (disebut *nelayan bagang*). Penyiapan jaring dan mesin biasanya melibatkan nelayan lain dan pembantunya, kadang-kadang juga keluarga. Peranan anggota keluarga dalam proses produksi ini terletak dalam proses persiapan ketika hendak berangkat ke laut. Istri biasanya berperan dalam menyiapkan perbekalan makanan dan anak laki-laki biasanya membantu menyiapkan kelengkapan lainnya, seperti membantu mengangkat jaring, mesin, atau membantu menguras air jika perahunya ada yang bocor.

Usaha perikanan di Bengkulu seluruhnya di pengaruhi oleh iklim, yaitu musim utara (Januari, Februari dan Maret), musim timur (April, Mei, Juni), musim barat (Juli, Agustus, September) dan musim selatan (Oktober, November dan Desember). Lebih jelasnya lihat kalender musim kegiatan nelayan di Bengkulu sebagai berikut:

No	Potensi	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Musim utara												
2	Musim timur												
3	Musim barat												
4	Musim selatan												
5	Kalender pengusahaan: Ikan												
	Udang												
6	Kondisi laut bahaya												

7	Stok produk tinggi																			
8	Kondisi pakeklik																			
9	Perilaku tenaga kerja dari nelayan																			
10	Perilaku tenaga kerja dari luar nelayan																			
11	Pendapatan para nelayan																			
12	Terjadi persaingan																			
13	Pembayaran uang kepada toke																			

Sumber: Data Primer diolah

Musim tangkapan menurut informasi yang penulis peroleh adalah musim utara, musim timur dan musim barat. Pada musim tersebut banyak kapal-kapal asing dari luar Bengkalis berdatangan untuk menangkap ikan, sedangkan musim selatan kebanyakan nelayan istirahat karena angin bertiup kencang dan gelombang badai.

Antara sesama nelayan di sini sering terjadi pertikaian dan konflik berkepanjangan, sampai ke pembakaran kapal dan terjadi pembunuhan, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan bulan April 1999. Hal ini telah mendapat penyelesaian khusus dari pihak berwajib, namun tidak ada ketentuan hukum yang pasti, sehingga terjadi kucing-kucingan antara nelayan yang bermodal tinggi dengan nelayan tradisional.

Permasalahan terjadinya konflik antara nelayan adalah alat tangkap bagi nelayan asing (pemodal tinggi) menggunakan jaring ukuran yang berlapis mencapai dasar laut, sehingga terumbu karang dan ikan-ikan kecil terkuras habis dan peralatan yang mereka pergunakan serba canggih, dapat mendeteksi posisi jumlah dan jenis ikan. Dari sini timbul semacam kesepakatan 4 mil dari pantai yang dibolehkan nelayan asing menangkap ikan di wilayah ini, bila melanggar maka kapal-kapal mereka dibakar.

Kondisi lainnya yang dapat menggambarkan kehidupan nelayan adalah pada hubungan antara nelayan dengan *toke* (penadah hasil perikanan). *Toke* pada lingkungan nelayan Bengkalis cukup dominan kegiatannya dalam jual beli hasil tangkapan. Nelayan di daerah ini cukup tergantung kepada kehadiran *toke*, karena disebabkan pasaran ikan hasil tangkapan apabila dijual kepada selain *toke* akan sulit laku. Hal ini terjadi karena tidak adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kondisi lain yang dapat menggambarkan ketergantungan nelayan kepada *toke* adalah pinjaman

modal dan kebutuhan lainnya. Kebanyakan *toke* adalah orang-orang kaya yang berasal dari luar Bengkalis dan mereka memberikan kemudahan dalam pemberian modal dan pinjaman kebutuhan lainnya, seperti barang-barang kebutuhan primer maupun sekunder, dan pinjaman dapat dilakukan walaupun mereka masih memiliki hutang. Cicilan pinjaman bisa dilakukan melalui hasil tangkapan mereka sehingga terkadang para nelayan setelah melaut pulang ke rumah tidak membawa hasil apa-apa karena hasil tangkapannya langsung diambil oleh *toke*.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh *toke* dan nelayan tergolong unik, karena transaksi mereka lakukan di atas laut sehingga apabila *toke* sudah menerima barang dari nelayan dapat langsung dibawa ke luar daerah, seperti di Kota Bengkalis serta Dumai dan ikan yang segar dan bagus dijual ke luar negeri. Nelayan langsung menerima hasil penjualan di laut.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan nelayan, sebagian besar nelayan menyatakan tidak setuju akan hadirnya *toke* di kalangan mereka. Namun, mereka juga tidak menutup mata bahwa kehadiran *toke* juga dapat membantu mereka, khususnya dalam penyediaan modal serta pinjaman kebutuhan-kebutuhan lain. Sikap *toke* juga tidak berbeda dengan para nelayan, mereka menyatakan bahwa kehadiran *toke* juga membawa malapetaka apabila pinjaman yang mereka dapat tidak mampu terbayarkan.

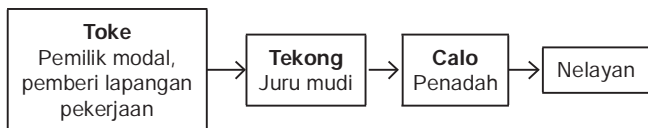
Pelapisan sosial menunjukkan pada pembagian suatu komunitas ke dalam lapisan-lapisan yang sangat kontroversi, kesempatan hidup dan pengaruh sosial yang tidak sama. Jejaring sosial dalam masyarakat nelayan sangat luas, baik antar komunitas dengan desa terdekat maupun antar komunitas dengan negara tetangga. Hal tersebut didukung oleh pola gotong royong yang sudah mendarah daging.

Etnis di Bengkalis terdiri dari suku Melayu, suku Jawa, Bugis, Banjar, Batak, suku terbelakang, dan lain-lain. Perbedaan kedudukan dan peranan masing-masing komunitas tidak terlalu ketara. Namun, sistem kekerabatan masih kental terutama dalam memilih kepala desa.

Kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang mempengaruhi orang lain. Pemimpin formal bersumber dari aspirasi masyarakat, keterbatasan juga kadang kala dominan. Selain pemimpin formal, pemimpin non-formal juga menjadi panutan masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh adat.

Kepatuhan masyarakat nelayan Bengkalis terhadap pimpinannya sangat tinggi, seperti tertuang dalam ketentuan yang tidak tertulis, yaitu norma adat, norma agama, dan norma gotong royong. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Gambaran di atas dapat terlihat mata rantai hubungan *toke*, tekong, calo dan nelayan, seperti skema sebagai berikut:



Kehadiran calo di sini tidak seperti calo TKW ke Malaysia. Calo di sini tidak serta merta diperlukan bagi nelayan, maupun *toke* ikan. Karena *toke* biasanya dapat melakukan sendiri barter atau beli ikan dengan nelayan. *Toke* di sini dapat diartikan sebagai juragan.

Di Bengkalis terdapat ±615 armada motor penangkap ikan dengan berbagai karakteristik nelayan, yang antara satu dengan yang lain memiliki ciri dan macam jenis ikan yang ditangkap. Antara lain udang, pengerih, terubuk, tuna, kurau, tenggiri, debuk, kelampai, dan lain-lain jenis ikan laut.

Penjualan hasil tangkapan dilakukan langsung di tempat depot bakul, yang berada di pinggir sungai tempat mereka mendarat. Penjualan biasanya dilakukan sekitar jam 09.00 WIB hingga jam 12.00 WIB. Tetapi biasanya juga tergantung pada waktu para nelayan mendarat setelah menangkap ikan di laut. Bakul/tengkulak kapan saja siap karena depotnya tidak jauh dari rumahnya. Ikan apa saja langsung ditimbang sesuai dengan harga pada saat itu dan langsung dibayar, jika ada hutang langsung dipotong.

Setelah hasil tangkapan laut terkumpul di depot-depot para bakul, hasil tangkapan itu kemudian didistribusikan ke titik-titik pemasaran, yaitu: 1) ke Bengkalis Kota, Dumai, dan ada yang diekspor ke luar negeri. 2) menjual langsung kepada para pedagang ikan, yang langsung didistribusikan kembali dengan berkeliling ke rumah-rumah penduduk desa lain. 3) menjual kepada para bakul ikan asin, untuk ikan-ikan tertentu seperti jenis sriping, teri, tongkol kecil, dan lain-lain. Lamanya pengeringan tergantung cuaca. Bisa setengah hari sampai dua hari, yang kemudian dikumpulkan dan dikirim ke Pekanbaru satu atau dua minggu sekali.

Para nelayan Bengkalis mengenal dua musim, selain musim di atas, yaitu musim ikan/along dan musim paceklik (musim pahit). Musim ikan biasanya terjadi pada musim laut teduh, yakni masa-masa pancaroba (peralihan) dari musim angin barat ke timur dan dari musim angin timur ke barat, sekitar bulan April sampai Juli, juga setiap bulan gelap pada setiap musim. Sedangkan musim pahit atau tangkapan kurang terjadi pada setiap bulan purnama, laut sangat terang dan puncaknya pada setiap angin barat. Sebetulnya akhir-akhir ini tangkapan ikan sangat menurun, "waktu aku kecil, ikan di laut banyak" (Atan, 15.00 WIB, 25/08/13). "saya sekolah sampai Aliyah itu dari hasil pasangan urang. Ikan itu untuk celengan" (Atan, 08.00 WIB, 05/08/13).

"Dengan pakan seadanya, bahkan terkadang secara alami, kami bisa mendapatkan hasil banyak karena makanan alami dari laut dan tanah tambak itu sendiri. Kami tidak memerlukan obat-obatan. Namun sekarang, pakan harus diatur, demikian juga obat-obatan pemusnah hama harus dibeli dengan harga mahal. Selain itu, patin harus diberi pakan kalau mau hasilnya bagus" (Nurhadi, 09.00 WIB, 27/08/13). "Mendingan jadi pegawai, Pak, empang *enggak* bisa *diandelin*, makanya anak-anak saya, saya suruh kuliah biar jadi guru" (Amir, 11.00 WIB, 05/08/13).

Masyarakat Desa Pantai Bengkalis mengatakan bahwa semua ini disebabkan oleh rusaknya hutan *mangrove*. Kerusakan hutan *mangrove* telah menyebabkan ikan berkurang di laut, udang menghilang di tambak, dan pakan alami di tambakpun jadi berkurang. Hutan *mangrove* sangat bermanfaat untuk hunian jentik-jentik ikan kecil, udangpun berkembang dan terlindungi dari limbah pertamina maupun dari *crude oil* yang terkadang tertumpah di laut.

Hal ini, selain disebabkan angin topan, terutama disebabkan penebangan hutan *mangrove* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kayu hasil penebangan ini kemudian dijual. Faktor ekonomilah yang menjadi alasan utama mereka melakukan ini semua. Rustam dan Yanto, nelayan tradisional yang jarak melautnya tidak jauh dengan peralatan perahu kecil, termasuk mereka yang sering menebang pohon bakau, "Kayu-kayunya ya dijual, namanya juga usaha, kalau bulan-bulan begini (Agustus) lagi paceklik, pailit, jual ikan hasilnya sedikit. Daripada *enggak* dapat uang, kayu juga *enggak* apa-apa kan bisa dijual untuk nambah-

nambah. Daripada nganggur lebih baik tebang kayu bakau/api-api, lumayan untuk nambah penghasilan, kami bisa menjual ini kira-kira Rp.60.000/m², akan lebih mahal bila bisa dibawa ke seberang negeri tetangga Malaysia.”

Rusaknya hutan *mangrove* tidak hanya mempengaruhi hasil tangkapan ikan, tetapi juga menyebabkan abrasi dan banjir. Setiap kali ada rob, air pasti tumpah ke jalan dan rumah penduduk, yang menyebabkan jalan rusak dan pemukiman becek dan terlihat kumuh. Inilah gambaran masyarakat nelayan Bengkalis yang sangat menginginkan kehidupan yang layak, hasil tangkapan yang melimpah, infrastruktur yang baik, dan kehidupan yang sejahtera seperti dulu.

Kesimpulan

Sampai saat ini, wujud perubahan Bengkalis baru menggeliat di sekitar pusat kota, belum menembus ke masyarakat nelayan. Walaupun ada perubahan, belum sepenuhnya dapat mereka jelaskan secara terperinci. Tetapi jika proses-proses ke arah perubahan dapat mereka pertahankan dan kembangkan, maka tinggal soal waktu saja untuk mencapai tahap-tahap perubahan tersebut.

Paradigma pembangunan bergeser ke arah pembangunan yang berpusat rakyat (*people centered development*) yang menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus mampu menggali dan mengembangkan potensi sosial ekonomi serta mengelolanya agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas. Bengkalis memiliki ketersediaan sumber daya alam perikanan yang cukup melimpah sehingga diperlukan adanya pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan baik, karena apabila tidak termanfaatkan dengan baik, maka kita akan ketinggalan dengan negara lain sehingga produk perikanan kita dapat dijarah oleh pihak-pihak asing.

Hasil kajian di lapangan memperlihatkan bahwa arus global dan program pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan tidak mampu membantu masyarakat nelayan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga program pemberdayaan yang ada selama ini hanya merupakan program yang menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas. Hal ini didukung juga dari kegiatan masyarakat yang kurang mengerti akan ketersediaan usaha perikanan mereka, usaha penangkapan ikan di Bengkalis memiliki potensi yang

cukup besar jika mampu mengelola kekuatan dan peluang serta mampu meminimalisir kelemahan dan ancaman yang datang dari dalam maupun luar usaha. Oleh karena itu, pengelolaan penangkapan rutin harian-hari harus diubah agar usaha ini menjadi lebih besar lagi karena potensi yang dimiliki masih cukup besar dan kurang termanfaatkan.

Untuk dapat mengembangkan usaha penangkapan ikan agar menjadi lebih baik lagi, maka perlu dilakukan strategi-strategi. Hal ini perlu dikaitkan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri. Strategi yang diterapkan haruslah realistis. Hal lain adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah atau investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang usaha penangkapan ikan, sehingga permasalahan terbatasnya modal yang seringkali dialami oleh nelayan ini menjadi teratasi.

Catatan: (Endnotes)

- 1 Drs. H. Hurmain, MA. adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
- 2 Puriana, SE., MM. adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
- 3 Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten, terletak di sebuah pulau yang strategis dekat dengan jalur pelayaran internasional yang paling ramai didunia yaitu selat Malaka. Dikelilingi laut dan pantai yang berhadapan dekat laut bebas. Ditepi pantai laut Bengkalis inilah yang penulis jadikan lokasi penelitian ini.
- 4 Metode kualitatif penulis gunakan untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, interpretasi data mengenai perubahan interrelasi sosial, alat penangkapan ikan yang mereka pakai dan perubahan ekosistem kelautan di Bengkalis (secara teknis penulis lakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi) lebih lanjut lihat dalam laporan penelitian ini.

Daftar Referensi

- A.H. Dharmawan. (2002). *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*. Bogor: Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB.
- Afrizal Cik. (2013). *Tanah Jantan Yang Melawan*. Pekanbaru: LAM Meranti & Pusaka Riau
- B. Mantra. (1991). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI.
- BAPPEDA Bengkalis. (2001). *Kabupaten Bengkalis dalam Angka*. Bengkalis: BPS.

- (2012). *Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis*. Bengkalis: BPS.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2001). *Laporan Nilai Ekspor dan impor Kabupaten Bengkalis Tahun 2001*.
- Dardjo Sumadjono dan Junuzul Yunus. (1991). *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Jakarta: LP3ES.
- Fredian Tonny. (2002). "Bahan Kuliah Pengembangan Masyarakat". Tidak Diterbitkan. Bogor: Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial-Ekonomi Pertanian IPB.
- G. Soemodiningrat. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gun Gun Sambas. (2002). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Ibu-Ibu Posyandu di Kelurahan Bojongherang Kabupaten Cianjur". Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- H. Hikmat. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hermanto, et.al. (1994). *Identifikasi dan Evaluasi Program/Proyek Penanggulangan Kemiskinan*. Bogor: Puslit Sosial Ekonomi Pertanian.
- Kansil. (1986). *Desa Kita*. Jakarta: Galileo Indonesia.
- Lala M. Kolopaking & Fredian Tonny. (2002). *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*. Bogor: Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. PPs. IPB.
- M. Tampubolon. (1999). Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. Data internet. <http://www.Wordbank.org>.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (1983). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung.
- N. Soedarsono. (2000). *Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)*. Jakarta: Yayasan Melati Bhakti Pertiwi.
- Nurmala KH. Pandjaitan dan Ida Yuhana. (2002). *Analisis Psikologi Masyarakat*. Bogor: Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB.
- Otok S. Pamuji. (1997). "Menuju Pendekatan Pembangunan yang Partisipatif". Dalam *Buletin Bina Swadaya*. No. II Tahun V, September 1997.
- R. Bintarto. (1983). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Galileo Indonesia.
- S. Adiwibowo. (2002). *Ekologi Manusia*. Bogor: Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. PPs.IPB.
- Sandra. (2002). *Memberdayakan Industri Kecil Berbasis Agra Industri di Pedesaan*. Bandung: Akatiga.
- Sumardjo dan Saharuddin. (2002). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Bogor: Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB
- Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsurizal. (1999). "Peran Aspek Kelembagaan dalam Kaitannya dengan Aksesibilitas Ekonomi dan Tingkat Pendapatan Nelayan di Kabupaten Bengkalis Riau". Tesis. Bogor: PPs. IPB.
- T.Ndraha. (1977). *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: IIP.
- T. Sumarti dan Tonny. (2002). *Sosial Perkembangan Komunitas*. Bogor: Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. PPs. IPB.
- Tarmizi Omar & Wan Razain. (2012). *Sejarah Datuk Laksamana Raja Dilaut*. Pekanbaru: Pusaka Riau.
- Undang-undang Otonomi Daerah, (2002). Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 95 Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Sinar Grafika.
- V.T. Manurung, Armen, Z dan Erizal J. (1989). *Penelitian Potensi dan Pengembangan Desa Pantai Maluku dan Sumatera Utara*. Bogor: Puslit Agro Ekonomi.
- Yusman Syaukat dan T. Sumarti. (2002). *Analisis Ekonomi Lokal*. Bogor: Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. PPs. IPB.
- Y. Syaukat. (2002). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal*. Bogor: Magister Profesional Pengembangan masyarakat. PPs. IPB.